

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dari suatu Negara, bahkan ada pepatah yang mengatakan “kebesaran suatu bangsa dapat dilihat dari sektor pendidikannya”. Ulama’ juga berpendapat “ dengan ilmu orang yang kecil (fisiknya) dapat terlihat besar, dan tanpa ilmu orang yang besar (fisiknya) dapat terlihat kecil”. Hal ini menunjukkan seberapa penting peranan pendidikan di suatu bangsa. Seperti halnya di negara kita tercinta Indonesia raya, pendidikan merupakan salah satu faktor pertama dan utama untuk di kembangkan. Karena pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter guna mengemban amanat masa depan bangsa.

1

Namun, upaya tersebut masih belum mengarah yang tepat, sehingga pemerintah kemudian mengapresiasi mutu pendidikan setelah GBHN 1993 yang memberi prioritas pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selanjutnya pemerintah memberikan perhatian dan terus bersemangat pada mutu pendidikan karena tidak mungkin mengembangkan mutu SDM tanpa meningkatkan mutu pendidikan.²

Pada tahun 1996 persoalan mutu pendidikan mulai dirasakan lebih serius, terutama untuk perguruan tinggi. Seperti halnya pemerintah menyusun usaha perbaikan mutu dan relevansi

Pada tahun 1996 persoalan mutu pendidikan lebih serius, terutama untuk perguruan tinggi. Sementara itu pemerintah menyusun usaha perbaikan mutu dan

nggi yang mendapat tekanan khusus dalam Strategi
angka Panjang (SPPT-JP, 1996-2005).³ Sayangnya

² Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2-3

³ Ibid., hal 3

daerah sekaligus otonomi pendidikan. Yang mana dengan desentralisasi, akan memberikan kesempatan pada pemerintah bahkan lembaga pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini merupakan tonggak berlakukannya manajemen mutu pendidikan dan menjadi pendorong tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Sehingga pendidikan tidak hanya ditentukan dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikembangkan sendiri oleh lembaga pendidikan.

Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan manajemen mutu pendidikan tahun 1999, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Setelah pemerintah memberlakukan k

andidikan tahun 1999, Pemerintah menetapkan

mor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangun

Undang-Undang ini pemerintah menetapkan penjaminan mutu lembaga pendidikan memberlakukan program penjaminan mutu sebagai rangkaian dari akreditasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (21) yang berisi “Evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan

“Pengembangan standar nasional pendidikan serta per
pelaporan pencapaiannya secara nasional di laksanakan
badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu
Pada pasal 50 ayat (2) di jelaskan “Pemerintah menentu
nasional dan standar nasional pendidikan untuk me
pendidikan nasional” dan pada pasal 51 ayat (2) di pa
“Pengelolaan satuan pendidikan tinggi di laksanakan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan e
transparan”. Selanjutnya, penjaminan mutu, evaluasi,
akreditasi di buat semakin jelas dan rinci dalam Bab XVI

nasional dan standar nasional pendidikan untuk me
pendidikan nasional” dan pada pasal 51 ayat (2) di pa
“Pengelolaan satuan pendidikan tinggi di laksanakan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan e
transparan”. Selanjutnya, penjaminan mutu, evaluasi,
akreditasi di buat semakin jelas dan rinci dalam Bab XVI
Sebagai tindak lanjut kebijakan mutu pendidikan

20 Tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pemerintah terbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan

Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*. (Surabaya), hal. 70.

pendidikan (pasal 91 ayat 2).

Sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan tindak lanjut implementasi kebijakan penjaminan pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan pendidikan (SPMP).

Maka kebijakan pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program vokasi membawa dampak positif bagi pemerintah terhadap SMK dan juga ekspektasi dari masyarakat dan pelanggan begitu tinggi terhadap output dari SMK sebagai

endidikan dan tindak lanjut implementasi kebijakan pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP).

Maka kebijakan pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program vokasi membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah terhadap SMK dan juga ekspektasi dari

Maka kebijakan pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program vokasi membawa dampak yang signifikan bagi pemerintah terhadap SMK dan juga ekspektasi dari masyarakat. Masyarakat yang pelanggan begitu tinggi terhadap output dari SMK. SMK sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah yang telah memiliki kejuruan yang sesuai dengan keahlian yang variatif sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dunia usaha dan dunia industri, walaupun terdapat tantangan yang dihadapi, namun akan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi. Mampu

mengabaikan tentang sistem manajemen mutu di sekolah. Hal ini disebabkan karena belum terdapat standar yang berlaku kepada sistem manajemen mutu yang di persyaratkan secara internasional seperti Sistem Manajemen Mutu (SMM) edisi terbaru 9001:2008. Kegagalan peningkatan mutu pendidikan sering terjadi akibat tidak di perhatikan oleh manajemen sekolah yang merupakan sistem untuk mengelola produk sekolah sehingga di hasilkan output / outcome yang sesuai dengan harapan pelanggan. Jika di perhatikan secara umum, yang ada sistem manajemen di SMK sekarang rata-rata belum ditemukan hal-hal sebagai berikut.

mengabaikan tentang sistem manajemen mutu di sekolah. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang sistem manajemen mutu yang di persyaratkan secara internasional seperti Sistem Manajemen Mutu (SMM) edisi terbaru 9001:2008. Kegagalan peningkatan mutu pendidikan sering terjadi akibat tidak di perhatikan oleh manajemen sekolah yang merupakan sistem untuk mengelola produk sekolah sehingga di hasilkan output / outcome yang sesuai dengan harapan pelanggan. Jika di perhatikan secara umum, yang ada sistem manajemen di SMK sekarang rata-rata ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- mengabaikan tentang sistem manajemen mutu di sekolah. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang sistem manajemen mutu yang di persyaratkan secara internasional seperti Sistem Manajemen Mutu (SMM) edisi terbaru 9001:2008. Kegagalan peningkatan mutu pendidikan sering terjadi akibat tidak di perhatikan oleh manajemen sekolah yang merupakan sistem untuk mengelola produk sekolah sehingga di hasilkan output / outcome yang sesuai dengan harapan pelanggan. Jika di perhatikan secara umum, yang ada sistem manajemen di SMK sekarang rata-rata ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- Apabila SMK akan mengelola sekolah dengan standar manajemen mutu internasional maka SMK perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas dalam menghasilkan produk yang memenuhi permintaan pelanggan dan peraturan yang berlaku, dan bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan yang terus menerus dari sistemnya dan pemastian di penuhi permintaan pelanggan, peraturan yang berlaku, serta adanya pengukuran, analisis dan perbaikan melalui kegiatan audit internal maka standar internasional ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem manajemen mutunya. Persyaratan dari standar internasional ini bersifat umum dan secara sistem dapat diterapkan pada SMK seperti SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo.

- Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo
 2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo
 3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana strategi Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo di lihat dari sudut pandang Manajemen Pendidikan

berkedudukan di Geneva, Swiss.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini dapat dipahami berkesinambungan, maka perlu penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu terdiri dari pendahuluan yang memberikan gambaran keseluruhan meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tentang kajian teori yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Manajemen Mutu.

F. Sistematika Penulisan

sebagai berikut:

Bab I yaitu terdiri dari pendahuluan yang membahas keseluruhan meliputi tentang latar belakang, rumusan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan pembahasan.

Bab II yaitu tentang kajian teori yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Manajemen Mutu.

Islam.

Bab III yaitu tentang metode penelitian yang meliputi definisi penelitian, tujuan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data atau validitas dan teknik analisis data.

penghambat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK 2 Buduran Sidoarjo, bagian ke tiga menjelaskan tentang penelitian. Dan bagian ke empat menjelaskan tentang penelitian di lihat dari sudut pandan Manajemen Pendidikan Islam).

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan pembahasan tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK 2 Buduran Sidoarjo (Telaah dari Sistem Manajemen Pendidikan Islam).

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan
pembahasan tentang Implementasi Sistem Manajemen
9001:2008 di SMK 2 Buduran Sidoarjo (Telaah dari S
Manajemen Pendidikan Islam).